

KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI JEPANG DI ABAD 21: FUNDAMENTALISME NEGARA DAN DIVERSIFIKASI SUMBER ENERGI

Muhammad Faris Alfadh¹

Abstract

This paper attempts to explain Japan's energy security policy in the midst of 21st century difficult situation. On the one hand, the emergence of China and India as new competitors in the global energy market has forced Japan to be more aggressive in securing its energy supply. On the other hand, unfavorable political instability in the Middle East, as the main supplier of Japan's energy, brings the energy vulnerability and uncertainty. Therefore, the politics of energy in the 21st century will be characterized by an aggressive strategy of Japan. In addition to the efficiency policy and diversification of energy use, Japan will seek to find other new sources place like Russia and central Asia, as well as direct intervention policies to secure the sources of energy rather than giving credence to the market mechanism. By doing so, politically, Japan's energy strategy would encourage the high level of competition and vulnerability of energy security in the Asia-Pacific.

Keywords: *energy security, Japan's energy security policy, diversification, energy vulnerability*

Abstraksi

Tulisan ini mencoba menjelaskan kebijakan ketahanan energi Jepang di tengah situasi yang cukup sulit abad 21. Di satu sisi, munculnya China dan India sebagai kompetitor baru di pasar energi dunia memaksa Jepang untuk lebih agresif mengamankan pasokan energinya. Di sisi yang lain, instabilitas politik di kawasan Timur Tengah, sebagai pemasok utama energi Jepang, membawa ketidakpastian dan kerentanan. Karena itu, politik energi di abad 21 akan diwarnai oleh strategi agresif Jepang. Selain kebijakan efisiensi dan diversifikasi penggunaan energi, Jepang akan berupaya mencari sumber-sumber baru ke Rusia dan Asia tengah, serta mengambil kebijakan intervensi langsung ke sumber-sumber energi daripada menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ini artinya, langkah Jepang akan mendorong tingginya persaingan serta kerentanan pola politik energi di kawasan Asia-Pasifik.

Kata-kata Kunci: *ketahanan energi, kebijakan ketahanan energi Jepang, diversifikasi, kerentanan energi*

¹ Penulis adalah Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Email: farisalfadh@umy.ac.id

Pendahuluan

Ketahanan energi akan selalu menjadi agenda prioritas tersendiri dalam politik luar negeri Jepang. Hal ini tidak terelakkan, mengingat untuk mendukung industrialisasi dan kemajuan ekonomi, Jepang memerlukan pasokan energi dalam jumlah besar, sementara sumber energi dalam negeri sangat terbatas. Karena itu, kebijakan untuk memastikan stabilitas pasokan energi dari luar negeri menjadi penting bagi para pengambil kebijakan Jepang.

Di tahun 1970-an Jepang pernah mengalami persoalan serius akibat terganggunya pasokan energi menyusul krisis minyak di tahun 1973. Hal tersebut berdampak sangat buruk bagi ekonomi Jepang. GDP turun drastis sementara harga barang terus melonjak. Sejak itu ketahanan energi menjadi isu penting dalam politik luar negeri Jepang.

Ketergantungan Jepang terhadap pasokan energi impor, terutama minyak, terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama beberapa dekade Jepang bahkan mendominasi permintaan energi di Asia. Selama dekade 1980-an dan 1990-an Jepang tidak mengalami persoalan serius dalam hal pasokan energi. Namun demikian, awal abad dua satu menghadirkan situasi yang cukup rentan. Hal tersebut, setidaknya, dapat dilihat dari tiga indikator: *Pertama*, tidak adanya sumber daya alam dalam negeri berupa energi.² *Kedua*, selama Perang Dingin, Jepang tidak banyak menghadapi kompetitor dalam mendapatkan pasokan energi. Dengan munculnya China dan India sebagai kompetitor baru, kini situasinya tampak semakin kompleks.

Ketiga, Jepang juga dihadapkan pada kemungkinan adanya gangguan terhadap pasokan energi dari Timur Tengah (sebagai pemasok minyak terbesar Jepang selama ini) yang disebabkan instabilitas politik di kawasan tersebut pasca perang Irak yang masih menyisakan persoalan akut, begitu juga ancaman terorisme. Selain itu, merebaknya gelombang revolusi di negara-negara Arab sejak akhir tahun 2010 memperkuat ketidakpastian.

Oleh karena itu, di awal abad 21, Jepang sangat berkepentingan menitik beratkan perhatian pada isu ketahanan energi. Tulisan ini akan mengelaborasi kebijakan dan strategi Jepang dalam mengamankan pasokan energinya di era yang cukup kompleks ini.

Penulis berargumen, selain terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap minyak, sebagaimana yang dilakukan selama ini, Jepang juga akan lebih agresif dalam memasuki sumber-sumber energi baru di luar kawasan Timur Tengah seperti Rusia, Asia Selatan dan Afrika. Kurang kuatnya tradisi bilateral dengan ketiga wilayah tersebut merupakan persoalan tersendiri. Karena itu peran dominan negara akan menjadi ciri khas kebijakan Jepang. Alih-alih mengikuti skema pasar dalam mengamankan pasokan energi, agresifitas Jepang akan lebih banyak didominasi intervensi kuat negara. Hal ini selain sebagai upaya menghadapi China, India, serta Korea Selatan, yang sudah lebih dulu melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah baru tersebut, juga untuk memastikan tidak adanya gangguan yang bisa mengancam stabilitas pasokan energi dari persoalan politik dan keamanan global seperti terorisme, pembajakan, ataupun konflik horizontal.

Secara politik, kebijakan Jepang akan semakin meningkatkan tensi kontestansi dalam mendapatkan pasokan energi di kawasan Asia. Persaingan antara negara-negara (ekonomi) besar

² Jepang menjadi negara anggota IEA (International Energy Agency) paling kritis dalam soal ketersediaan energi dalam negeri mengingat lokasinya yang terisolasi serta ketiadaan sumber daya alam. Lihat IEA. 2003. *Energy Policies of IEA Countries: Japan 2003 Review*. OECD: Paris. hlm. 7.

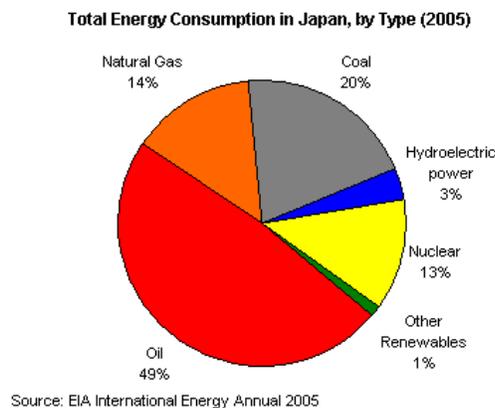
seperti China, Jepang, India, Korea Selatan, begitu juga Indonesia (yang sudah menjadi negara net-importir minyak), dengan demikian tidak terhindarkan lagi.

Besarnya Kebutuhan Energi Impor

Tidak diragukan lagi, perhatian serius Jepang terhadap kebijakan ketahanan energi didasarkan pada kenyataan akan besarnya ketergantungan laju ekonomi nasional serta transportasi lokal terhadap pasokan energi. Fakta bahwa minimnya sumber energi dalam negeri membuat Jepang sangat bergantung kepada pasokan energi dari luar. Saat ini Jepang merupakan negara konsumen energi terbesar keempat di dunia setelah AS, Rusia, dan China. Namun perbedaan paling mendasar adalah, ketiga negara yang disebutkan sebelumnya juga penghasil energi, sementara Jepang tidak. Hampir semua cadangan energi Jepang berupa minyak, batu bara, dan gas alam, bergantung pada pasokan luar negeri.³

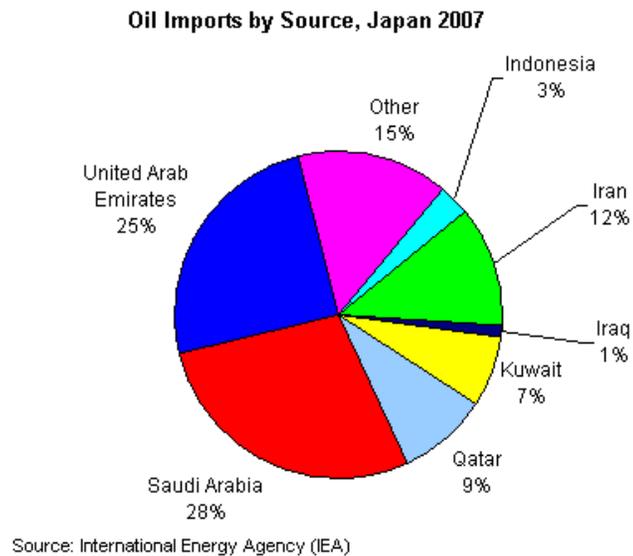
Kesadaran akan ketergantungan energi luar negeri sudah dirasakan Jepang sejak terjadinya krisis minyak tahun 1973. Krisis yang turut melambungkan harga minyak di pasar dunia tersebut menjadi pengalaman buruk bagi negara-negara industri dunia, khususnya Jepang, yang saat itu mulai menerapkan model ekonomi *developmental state*. Bahkan negara yang sering dijuluki negeri matahari terbit ini mengalami kerugian paling teruk karena ketiadaan sumber energi dalam negerinya. Sejak itu ketergantungan Jepang terhadap pasokan energi luar negeri semakin tinggi. Hingga tahun 1980-an, sebanyak 90 persen dari total kebutuhan energi Jepang berasal dari impor. Jumlah tersebut sedikit berkurang menjadi 85 persen di tahun 1990-an karena kebijakan pengurangan jumlah konsumsi serta pembangunan sumber energi alternatif.

Dari total konsumsi energi nasional Jepang, minyak masih menjadi yang paling utama. Di tahun 2007 saja, konsumsi minyak Jepang mencapai hampir 5 juta barel perhari, menjadikannya sebagai konsumen terbesar ketiga di dunia setelah AS dan China. Walaupun pembagian total konsumsi telah banyak mengalami penurunan sejak 1970-an, namun saat ini minyak tetap dominan yakni sebesar 49 persen, menyusul setelahnya batu bara (20 persen), gas alam (14 persen), serta tenaga nuklir (13 persen) (**lihat grafik**)



³ Kojima, A. 2005. "East Asia's Thirst for Energy". *Japan Echo*, 32 (5). hlm. 32-35.

Pasokan minyak Jepang sebagian besar berasal dari negara-negara di Timur Tengah, yakni sebesar 90 persen (**lihat grafik**). Jumlah ini naik dari 70 persen di tahun 1980-an. Jepang sebenarnya sudah mampu mengurangi ketergantungan dari negara-negara Timur Tengah sejak krisis minyak tahun 1973, namun ketergantungan tersebut kembali meningkat, terutama sejak awal dekade 1990-an. Kebijakan Jepang untuk kembali bersandar pada pasokan minyak Timur Tengah turut dipengaruhi oleh beberapa negara Asia Timur lainnya seperti China dan juga Indonesia. Kedua negara ini, yang sebelumnya turut mengekspor minyak ke Jepang, beralih menjadi net importir karena meningkatnya konsumsi domestik seiring laju modernisasi di dua negara tersebut.⁴ Karena itu pilihan untuk kembali ke Timur Tengah tidak bisa dihindari mengingat kebutuhan akan minyak yang masih sangat dominan.

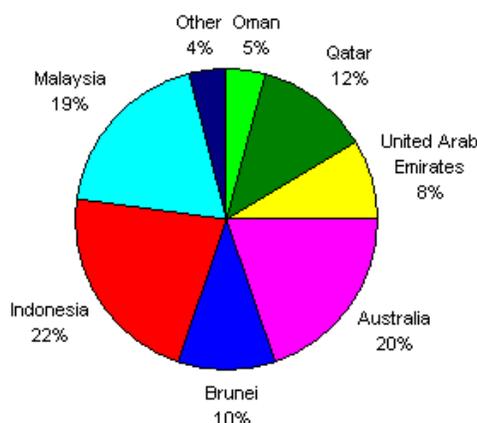


Sumber energi terbesar kedua Jepang adalah batu bara, yakni sebesar 20 persen. Dan untuk sektor ini hampir 100 persen Jepang tergantung dari pasokan luar negeri. Sebagian besar impor berasal dari negara-negara yang cukup stabil secara politik seperti Australia dan Kanada.⁵ Sementara untuk gas alam menyumbang sekitar 14 persen dari total energi nasional. Sebagian besar (sekitar 97 persen) gas alam Jepang bergantung dari pasokan luar negeri yang berasal dari negara yang cukup beragam namun sebagian besar dari kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, selanjutnya adalah Australia.

⁴ Untuk kasus Indonesia, selain dipengaruhi konsumsi nasional yang terus meningkat, juga dikarenakan jumlah produksi minyak dalam negeri yang terus menurun.

⁵ Jain, Purnendra. 2007. "Japan's Energy Security Policy in an Era of Emerging Competition in the Asia-Pacific". Dalam Michael Wesley. *Energy Security in Asia*. New York: Routledge. hlm. 33

LNG Imports by Source, Japan 2006



Source: U.S. Energy Information Administration

Jepang juga aktif meningkatkan kebutuhan sendiri dengan membangun teknik baru dalam mengumpulkan energi, seperti solar atau teknologi tenaga angin. Meski demikian, skup pembangunannya masih sangat terbatas disebabkan biaya produksi yang cukup tinggi serta kebutuhan akan kondisi cuaca alam. Walhasil, langkah alternatif tersebut masih menjadi sumber yang tidak stabil.

Melihat komposisi dan persentase konsumsi energi nasional Jepang, tampaknya di tahun-tahun mendatang Jepang masih akan banyak bergantung pada energi minyak impor. Namun demikian, ketergantungan terhadap satu sumber dominan tentu sangat mengkhawatirkan, apalagi jika sumber tersebut lebih banyak berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah—kawasan yang nota bene mengalami intensitas gejolak politik cukup tinggi. Perang Irak yang masih menyisakan persoalan akut, serta gelombang revolusi di beberapa negara, semakin membuat kawasan ini tidak stabil secara politik. Untuk memaksimalkan akses terhadap energi, pemerintah Jepang turut melibatkan beberapa negara di kawasan ini dalam pertukaran sumber daya manusia dan kerjasama di sektor minyak, seperti pembangunan teknologi penyulingan. Namun tetap saja situasi di kawasan bisa berubah kapan saja.⁶

Karena itu di antara strategi Jepang di awal abad dua satu adalah kebijakan diversifikasi: baik diversifikasi jenis energi dengan terus mengembangkan energi-energi alternatif dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak, ataupun diversifikasi sumber pemasok energi secara geografis. Selain itu, Jepang akan mendorong intervensi negara yang lebih besar dalam memastikan tersedianya pasokan energi, baik melalui upaya diplomatik maupun membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan nasional Jepang.

Pertama, salah satu upaya positif yang berhasil dilakukan Jepang selama ini adalah terus mengurangi ketergantungan terhadap minyak, yakni dengan melakukan diversifikasi energi ke gas

⁶ *Ibid.* hlm. 31.

alam, batu bara, dan tenaga nuklir. Langkah ini setidaknya cukup berhasil mengurangi ketergantungan Jepang terhadap minyak sebesar 50 persen dari total kebutuhan. Permintaan minyak dalam negeri Jepang mengalami penurunan sejak tahun 2005 dengan pengecualian pada tahun 2008 yang sempat mengalami peningkatan, dan kembali turun di tahun 2009. Penurunan ini didorong oleh faktor struktural, seperti penggantian bahan bakar, pengereman jumlah populasi dan target efisiensi energi. Ditambah lagi perubahan yang terjadi di sektor industri dengan mulai digunakannya gas alam.⁷

Kedua, Jepang terus berupaya mencari sumber-sumber energi di wilayah-wilayah yang baru sebagai upaya diversifikasi secara geografis. Negara-negara seperti Rusia, Asia Tengah, dan Afrika akan menjadi prioritas baru Jepang dalam kebijakan ketahanan energinya.⁸

Diversifikasi dan Fundamentalisme Negara: Strategi di Tengah Kompleksitas

Setelah krisis minyak tahun 1973, yang berdampak sangat buruk bagi ekonomi nasional Jepang, ketahanan energi menjadi poin penting dalam perumusan kebijakan keamanan Jepang. Hal ini segera tampak dalam laporan “Japan’s Comprehensive National Security” di tahun 1980.⁹ Ada dua poin penting yang tertuang dalam laporan tersebut: (a) memastikan cukupnya pasokan energi Jepang dalam jangka panjang, terutama menyikapi kemungkinan tingginya permintaan energi dunia, baik dari negara-negara industri maju ataupun yang baru mengalami industrialisasi; (b) melakukan perubahan metode dalam memastikan pasokan energi dengan terus mengembangkan sumber-sumber energi lain seperti gas, batu bara, dan tenaga nuklir, seiring upaya untuk terus mereduksi tingkat konsumsi minyak.

Terkait poin kedua, dua tahun sebelumnya, yakni tahun 1978, Ministry of International Trade and Industry (MITI) sebenarnya telah menekankan pentingnya meningkatkan konsumsi batu bara, gas alam, tenaga nuklir dan sumber energi terbarukan termasuk solar, teknologi gelombang biomass dan angin. Upaya ini terbilang cukup berhasil menurunkan jumlah konsumsi minyak dari 82 persen di tahun 1972 menjadi 72 persen di tahun 1980. Kini dari total konsumsi energi nasional Jepang, konsumsi sektor minyak tidak lebih dari 50 persen. Meski demikian, dari sisi pemasok energi, terutama minyak, upaya diversifikasi secara geografis yang dilakukan tampaknya belum cukup berhasil. Pada awalnya Jepang mampu mengurangi ketergantungannya terhadap Timur Tengah melalui sumber-sumber minyak di Asia Pasifik dan Afrika, namun kini Jepang kembali bergantung ke negara-negara Timur Tengah—bahkan jumlahnya mencapai 90 persen dari total permintaan minyak nasional.

Kebijakan diversifikasi juga turut mendorong upaya penggunaan tenaga nuklir. Di tahun 2004, Jepang memiliki 53 reaktor tenaga nuklir, menjadikan Jepang sebagai negara dengan jumlah reaktor nuklir terbanyak ketiga setelah AS (103) dan Prancis (57).¹⁰ Penggunaan tenaga nuklir memang sangat potensial. Jepang sangat mungkin memproduksi lebih banyak bahan bakar daripada

⁷ EIA (Energy Information Administration). 2008. *Country Analysis Briefs, Japan*. hlm. 2.

⁸ *Ibid.* hlm. 4.

⁹ Chapman, J. W., Drifte, R, & Gow, I.T.M. 1982. *Japan’s Quest for Comprehensive Security: Defence, Diplomacy, Dependence*. New York: St Martin’s Press. hlm. 189.

¹⁰ Jain, Purnendra. *Op.cit.* hlm. 33

jumlah konsumsi mereka. Artinya Jepang akan mampu mereduksi dengan sangat signifikan ketergantungan mereka dari pasokan luar negeri.¹¹

Tenaga nuklir memang menjadi sumber energi alternatif yang cukup menjanjikan. Selain berbiaya murah (jauh lebih murah dibandingkan minyak), juga ramah lingkungan. Namun demikian, tenaga nuklir bukannya tanpa persoalan. Salah satu kekhawatiran adalah potensi bahaya dari plutonium (bahan dasar kasar dari senjata nuklir) yang dihasilkan selama proses produksi. Selain itu keselamatan menjadi faktor yang sangat penting diperhatikan. Beberapa kasus kecelakaan nuklir telah berdampak buruk pada kepercayaan akan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir. Salah satu kasus, misalnya, ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Shernobyl, Ukraina, tahun 1986.

Selain itu, yang menjadi kekhawatiran paling besar di kawasan Asia Pasifik justru pada dampak politik di kawasan. Sebagaimana yang dikemukakan Calder, "permintaan energi yang begitu tinggi (justru) akan menciptakan kondisi proliferasi nuklir di Asia".¹² Secara regional, tambahan kapasitas tenaga nuklir Jepang bisa jadi akan memicu perlombaan nuklir baik di kawasan Asia Timur maupun Asia Pasifik, terutama dua negara tetangga Korea Selatan dan juga China. Tren peningkatan penggunaan tenaga nuklir ini juga akan diikuti oleh negara Asia lainnya, termasuk India.

Di tahun 2005, Agency for Natural Resource and Energy (ANRE) mengeluarkan kebijakan dasar energi Jepang, dengan mengidentifikasi lima prinsip dalam menjaga ketahanan energi:¹³ *Pertama*, Jepang perlu meningkatkan stabilitas suplai energi, memastikan cadangan minyak dalam negeri dan mengembangkan ladang minyak sendiri. *Kedua*, perlu melaksanakan program perlindungan energi. *Ketiga*, Jepang perlu mengembangkan sumber energi alternatif yang lain. *Keempat*, demi mendukung pencegahan *global warming*, perlu penggunaan lebih banyak tenaga nuklir dan energi terbarukan (tanpa CO₂) dan gas alam (yang memiliki sedikit kandungan CO₂). *Kelima*, Jepang perlu mendorong reformasi sektor energi dalam merespon globalisasi, memastikan semua pemain ada dalam mekanisme pasar serta aturan yang berlaku.

Namun demikian melihat isu energi dunia internasional yang semakin kompleks, membuat Jepang perlu mengambil langkah serius. Kini Jepang menghadapi tantangan tidak hanya dari kompetitor-kompetitor baru seperti China dan India, melainkan juga kompleksitas persoalan politik dan keamanan global seperti terorisme, pembajakan, serta konflik horizontal, yang bisa jadi akan sangat mengganggu stabilitas pasokan energi Jepang. Isu terorisme, misalnya, dipandang oleh pemerintah Jepang sebagai salah satu ancaman paling serius terkait keamanan pasokan energi.¹⁴ Dalam laporan yang diberi judul "Interim Security Report" yang dikeluarkan Japan's Energy Security Group bulan Juni 2006, disebutkan bahwa terorisme menjadi salah satu ancaman paling serius yang dihadapi Jepang, terutama di jalur-jalur laut yang sering dilalui kapal-kapal pengangkut minyak dari Timur Tengah ke Jepang. Jalur yang paling rentan terhadap serangan terorisme adalah selat Malaka.

¹¹ Calder, K. E. 1997. *Asia's Deadly Triangle: How Arms, energy and Growth Threaten to Destabilize Asia-Pacific*. London: Nicholas Brealey Publishing. hlm. 6.

¹² *Ibid.*

¹³ Jain, Purnendra. *Op.cit.*

¹⁴ Eric Watkins. 2006. "Japan's Energy Supplies at Risk". *Terrorism Monitor*. Volume 4, Issue 22.

Selain juga beberapa jalur laut lainnya. Begitu juga kemungkinan adanya serangan-serangan terorisme yang bisa berdampak langsung terhadap jalur-jalur pipa, ataupun beberapa terminal.¹⁵

Di tahun 2006 Jepang merumuskan kebijakan ketahanan energi yang baru, dan cukup berbeda dari kebijakan tahun 2005 sebelumnya, terutama pada poin terakhir. Strategi terbaru Jepang yang dikeluarkan Ministry of Economy Trade and Industry (METI) di bulan Mei dengan judul “New National Energy Strategy”, menjadi upaya pemerintah membangun visi yang menyeluruh terkait kebijakan ketahanan energi, yang menekankan pada peran pemerintah dalam memastikan pasokan energi, dengan mendorong perubahan dari mekanisme keterbukaan pasar ke upaya intervensi pemerintah yang lebih besar.¹⁶ Hal ini cukup berbeda dari kebijakan pemerintah Jepang sebelumnya yang cenderung mendukung lebih besar pada mekanisme pasar. Strategi Jepang yang baru ini juga menggambarkan upaya peningkatan keamanan dengan memadukan tujuan dari kebijakan energi dan kebutuhan akan penekanan kemandirian melalui kebijakan efisiensi ekonomi.¹⁷

Strategi tersebut terdiri dari tiga poin penting: *Pertama*, meningkatkan peran aktif pemerintah dalam menentukan pasokan energi Jepang dan struktur permintaan. Tindakan ini termasuk meningkatkan efisiensi energi serta diversifikasi dan desentralisasi sumber energi. Tenaga nuklir mendapat perhatian serius terkait kemampuannya mengurangi ketergantungan dari luar, serta mengurangi emisi CO₂. *Kedua*, memperkuat diplomasi dan meningkatkan kemampuan Jepang dalam menjamin stabilitas pasokan minyak dan sumber gas alam. *Ketiga*, memperbesar kemampuan Jepang dalam merespon keadaan darurat dengan meningkatkan sistem penyediaan stok gas. Upaya ini termasuk melibatkan sektor swasta dalam sistem penanggulangan resiko yang lebih besar yang bisa datang kapan saja, baik akibat kecelakaan, bencana alam, ataupun insiden seperti terorisme.

Selain itu, terdapat lima aspek penting yang termasuk dalam strategi baru energi Jepang (**lihat Tabel**), yakni: (a) Efisiensi energi. Dalam hal ini pemerintah dan sektor industri diupayakan bisa bekerjasama mengurangi rasio konsumsi energi hingga 30 persen dari GDP di tahun 2030; (b) Mengurangi ketergantungan terhadap minyak secara keseluruhan hingga 40 persen; (c) Mengurangi ketergantungan minyak terutama di sektor transportasi. Saat ini sekitar 75 juta mobil dan truk yang ada di Jepang bergantung hampir 100 persen pada minyak. Di tahun 2030 Jepang berupaya mengurangi ketergantungan tersebut hingga 80 persen dengan cara memperkenalkan teknologi baru seperti *hybrid*, *biofuels*, dan temuan teknologi baru lainnya; (d) Meningkatkan penggunaan tenaga nuklir yang saat ini hanya berkisar 28 persen dari suplai energi listrik menjadi 40 persen di tahun 2030; (e) Memperluas peran perusahaan milik Jepang dalam menyuplai energi. Saat ini perusahaan Jepang menyuplai sekitar 15 persen dari total kebutuhan minyak mentah. Strategi yang baru berupaya meningkatkan kontribusi perusahaan Jepang sebesar 40 persen di tahun 2030.

¹⁵ Lihat “Interim Security Report” yang dikeluarkan Japan’s Energy Security Group, Juni 2006, www.enecho.meti.go.jp/english/report/060908c-1.pdf, diakses tanggal 14 Juli 2012. Dalam laporan tersebut, Japan’s Energy Security Group mengidentifikasi beberapa ancaman serius yang dihadapi keamanan energi Jepang, di antaranya: (1) situasi politik di Timur Tengah, (2) terorisme, bencana alam, dan kesalahan pengelolaan, (4) tren permintaan energi global yang mulai berubah (terutama dengan munculnya Cina, India, dll.), dan (5) beberapa isu yang langsung terkait industri energi.

¹⁶ *New National Energy Strategy (Digest)*. Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo, Japan, May 2006.

¹⁷ Evans, Peter C. 2006. “Energy Security Series: Japan,” *The Brookings Foreign Policy Studies*, Desember, hlm. 19.

Tabel 1
Numerical Targets Set by Japan's National Energy Strategy

Energy Security Measure	2030 Targets
Energy Conservation	Increase economy-wide by at least 30%
Overall Oil Dependence	Reduce to 40% of total primary energy supply
Oil Dependence in transport sector	Reduce to 80% of consumption
Nuclear Power	Increase production to 30-40% of total electricity supply
Japanese Crude Oil Imports	Increase ratio to 40% of total crude oil imports

Sumber: Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo, Japan, Mei 2005

Karena itu, melihat strategi ketahanan energi Jepang yang baru, pada beberapa tahun mendatang, Jepang diproyeksikan akan semakin agresif dalam mengambil peran di pasar energi internasional. Hal tersebut bisa dilihat dari mulai berkurangnya kepercayaan Jepang terhadap mekanisme pasar dengan lebih memilih intervensi langsung negara pada sumber-sumber energi melalui lobi-lobi dan diplomasi, seperti yang dilakukan Jepang di beberapa negara penghasil energi di wilayah Asia Tengah. Ini artinya, Jepang tidak hanya turut memberikan indikasi akan kompleksnya pola pasokan energi dunia pada masa yang akan datang, tetapi sekaligus turut meningkatkan kemungkinan tensi persaingan dalam mendapatkan energi, terutama di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Persoalan Diversifikasi Pasokan Energi

Semakin kompleksnya persoalan ketahanan energi yang dihadapi Jepang, terutama disebabkan mulai munculnya kompetitor seperti China dan India, serta masih besarnya ketergantungan kepada pasokan energi Timur Tengah, memaksa Jepang untuk terus memikirkan kebijakan terbaik demi mengamankan pasokan energi dalam jangka panjang. Salah satunya adalah terus memperluas cakupan sumber-sumber energi dari negara-negara lain di luar kawasan Timur Tengah, terutama Rusia dan negara-negara Asia Tengah. Meski demikian, Jepang tetap menghadapi persoalan.

Wilayah Rusia

Sudah sejak lama Jepang melihat Rusia sebagai sumber energi yang potensial, terlebih secara politik Rusia cukup stabil di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin (meski posisi Putin sempat digantikan oleh Presiden Dimitry Medvedev di tahun 2008, namun kini Rusia kembali dipimpin Putin). Namun letak geografis Jepang yang terisolasi menjadi salah satu hambatan bagi saluran pipa ke Jepang. Satu-satunya kemungkinan adalah jalur pipa dari Siberia ke Korea Selatan dan Kyushu, namun solusi tersebut akan mendapat tantangan dari China dan Korea Utara. Di sisi lain Jepang juga terkendala dengan masih adanya perselisihan territorial yang belum selesai dengan Rusia.

Pada awalnya Jepang juga enggan berinvestasi ke Rusia mengingat masih adanya perselisihan territorial, namun kebutuhan akan energi akhirnya membuat Jepang berubah.¹⁸ Jepang

¹⁸ Fackler, M. 2003. "Japan: Hunt for Oil", *Far Eastern Economic Review*, Maret. hlm. 19.

setuju menginvestasikan 5 milyar dolar dalam proyek jalur pipa Nakhodka, yang turut melibatkan China, di mana China juga turut mendukung secara finansial. Pemasangan pipa kemudian direncanakan dua rute. Proyek pertama adalah jalur pipa ke China melalui Daqing. Rute lainnya menuju Laut Pasifik, melalui sepanjang jalur kereta api Trans-Siberia ke Nakhodka. Rute Pasifik menempuh jarak sekitar 4.200 kilometer, menghubungkan Tiashet di sebelah barat Siberia dan Perevonznaya dekat Nakhodka.¹⁹

Namun rencana ini kemudian mengalami kemunduran karena terkendala hubungan Jepang-Rusia. Jepang mulai enggan memberikan dana untuk proyek ini sementara China menginginkan jalur pipa ke Daqing dibangun terlebih dahulu daripada proyek Jepang menuju Laut Pasifik. Lebih jauh, tingkat hubungan Jepang-Rusia terus menurun, sementara di sisi lain hubungan China-Rusia semakin meningkat.

Selain itu, tidak hanya negara-negara Asia Timur yang bersaing mendapatkan sumber energi dari Rusia, India juga sama aktifnya. Di bulan Desember tahun 2004, misalnya, selama kunjungan Presiden Putin ke New Delhi, India dan Rusia menandatangani MoU yang menjadi dasar bagi explorasi bersama dan distribusi gas alam dari sungai Caspia yang juga akan dibangun fasilitas penyimpanan gas bawah tanah di India.²⁰

Wilayah Asia Tengah

Pencarian energi Jepang juga beralih ke Asia Tengah. Di bulan Agustus 2006, dalam kunjungan luar negeri terakhirnya sebagai Perdana Menteri, Junichiro Koizumi melakukan kunjungan empat hari ke Asia Tengah, menjadikannya PM Jepang pertama yang mengunjungi kawasan tersebut. Ia berbicara dengan Presiden Kazakstan, Nursultan Nazarbayev, diikuti pertemuan dengan Presiden Uzbekistan, Islam Karimov. Kunjungan ini bertujuan memperkuat hubungan politik dan ekonomi yang telah dimulai Jepang sejak tahun 1990-an.²¹ Pada umumnya Jepang fokus pada bantuan ke kawasan. Namun kunjungan Koizumi di tahun 2006 semakin memperjelas tujuan Jepang: kebutuhan akan sumber energi. Kunjungan tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kebijakan Koizumi sebelumnya di tahun 2002, ketika ia mengutus wakil menteri luar negeri, Sugiura, untuk memimpin misi "Silk Road Energy Mission" ke Kazakstan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan Turkmenistan, untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah potensial yang bisa diajak kerjasama. Inisiatif tersebut kemudian dilanjutkan dengan diadakannya dialog di tahun 2004 yang digagas Jepang untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan di kawasan Asia Tengah.

Walaupun tidak sebanyak Rusia, namun cadangan energi di kawasan Asia Tengah cukup menjanjikan. Kazakstan memiliki cadangan minyak sekitar 39.6 milyar barel, serta 106 triliun kubik gas alam, menjadikannya termasuk dalam sepuluh besar negara dengan cadangan minyak dan gas terbesar di dunia.²² Asia Tengah juga berpotensi sebagai penyedia uranium masa depan. Walaupun belum ada data spesifik terkait jumlah konsumsi uranium Jepang, namun diperkirakan Jepang

¹⁹ Jain, Purnendra. *Op.cit*, hlm. 35

²⁰ *Op.cit*.

²¹ Lihat Len, Christopher. 2005. "Japan's Central Asian Diplomacy: Motivations, Implications and Prospects for the Region". *The China and Eurasia Forum Quarterly*, vol. 3, no. 3, November. hlm. 127-49.

²² Evans, Peter C. 2006. "Energy Security Series: Japan," *The Brookings Foreign Policy Studies*. Desember. hlm. 17.

mengonsumsi sebesar 10.000 ton. Dengan masih rendahnya penggunaan tenaga nuklir dunia sementara permintaan minyak dari China dan India terus meningkat, muncul keinginan kuat Jepang untuk mempertimbangkan penggunaan uranium dalam jangka panjang.

Namun demikian, di kawasan Asia Tengah ini, sedari awal Jepang sudah menghadapi kompetitor dari dua negara tetangganya: China dan Korea Selatan. Perusahaan China lebih dulu telah mengambil sebagian besar proyek energi, terutama di Kazakstan, yang telah dimulai sejak 1997.²³ Begitu juga dengan perusahaan Korea Selatan. Di tahun 2004, misalnya, perusahaan Korean Natioan Oil memperoleh 69 persen hasil minyak di ladang minyak Tenge, yang berlokasi di barat-daya bagian dari Kazakhstan.²⁴

Walaupun Asia Tengah sangat menjanjikan bagi pasokan energi Jepang, strategi penguasaan energi berhadapan dengan kompetitor-kompetitor lain yang menjadikan situasi pasar energi sangat kompleks.

Kesimpulan

Di abad dua satu ini ketahanan energi Jepang dihadapkan pada persoalan yang semakin kompleks. Masih tingginya kebutuhan pasokan energi impor, terutama minyak, serta munculnya kompetitor dalam mendapatkan pasokan energi membuat Jepang semakin menitikberatkan pada kebijakan ketahan energi—bahkan semakin pro-aktif.

Ketergantungan yang masih besar pada pasokan energi Timur Tengah, sementara upaya memperluas pasokan energi dari Rusia dan Asia Tengah masih mengalami kendala, turut memaksa Jepang untuk bersikap agresif. Hal tersebut mengingat dalam menjaga stabilitas pasokan energi, Jepang akan dihadapkan pada kompetisi yang ketat dari beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik sendiri seperti China dan India, belum lagi kekhawatiran gangguan pasokan energi dari Timur Tengah mengingat secara politik kawasan tersebut relatif tidak stabil. Isu terorisme dan pembajakan juga menjadi persoalan tersendiri.

Karena itu, selain kebijakan efisiensi dan diversifikasi penggunaan energi yang beralih ke gas, batu bara, dan tenaga nuklir, Jepang juga akan mengambil kebijakan intervensi langsung ke sumber-sumber energi daripada menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Ini artinya, langkah Jepang akan mendorong tingginya persaingan serta kerentanan pola politik energi di kawasan Asia-Pasifik.

Daftar Pustaka

- Calder, K. E. 1997. *Asia's Deadly Triangle: How Arms, energy and Growth Threaten to Destabilize Asia-Pacific*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Chapman, J. W., Drifte, R, & Gow, I. T. M. 1982. *Japan's Quest for Comprehensive Security: Defence, Diplomacy, Dependence*. New York: St Martin's Press.
- EIA (Energy Information Administration). 2008. *Country Analysis Briefs, Japan*.
- Eric Watkins. 2006. "Japan's Energy Supplies at Risk" *Terrorism Monitor*, Volume 4, Issue 22.

²³ Wu, Kang and Han, Shair Ling. 2005. "Chinese Companies Pursue Overseas Oil and Gas Assets". *Oil & Gas Journal*, April 18. hlm. 18–25.

²⁴ Evans, Peter C. *Ibid*. hlm. 18.

- Evans, Peter C. 2006. "Energy Security Series: Japan," *The Brookings Foreign Policy Studies*. Desember.
- Fackler, M. 2003. "Japan: Hunt for Oil". *Far Eastern Economic Review*. Maret.
- IEA (International Energy Agency). 2003. *Energy Policies of IEA Countries: Japan 2003 Review*. Paris: OECD.
- Japan's Energy Security Group, "Interim Security Report", Juni 2006, www.enecho.meti.go.jp/english/report/060908c-1.pdf, diakses tanggal 14 Juli 2012.
- Kojima, A. 200., "East Asia's Thirst for Energy". *Japan Echo*, 32 (5). hlm. 32-35.
- Len, Christopher. 2005. "Japan's Central Asian Diplomacy: Motivations, Implications and Prospects for the Region". *The China and Eurasia Forum Quarterly*, vol. 3, no. 3, November. hlm. 127–49.
- New National Energy Strategy* (Digest). Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo, Japan, May 2006.
- Wesley, Michael. 2007. *Energy Security in Asia*. New York: Routledge.
- Wu, Kang and Han, Shair Ling. 2005. "Chinese Companies Pursue Overseas Oil and Gas Assets". *Oil & Gas Journal*, April 18. hlm. 18–25.